BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil serta lebih dekat kepada masyarakat dan memiliki kedudukan penting dalam menjalankan otonomi daerah yang diamanatkan oleh konstitusi demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penentuan keberhasilan suatu pemerintahan desa dapat diukur dari pembangunan desa, baik berupa infrastruktur dan juga kesejahteraan serta tingkat pendidikan masyarakat. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa. Pengertian desa diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desa yang berbunyi sebagai berikut:[1]

"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

[1] H.A.W. Widjaja, "*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.

Pemerintahan desa dibentuk untuk menjalankan urusan pemerintahan desa yang di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat. Kewenangan desa meliputi hal-hal sebagai berikut:[2]

1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
2) Kewenangan lokal berskala desa;
3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, ataupun pemerintah daerah kabupaten atau kota;
4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pemerintah daerah provinsi, ataupun pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan desa, kepala desa tidak bisa bekerja sendiri melainkan dibantu oleh perangkat desa, dan sekertaris desa. Perwujudan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD merupakan perwujudan dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya BPD berfungsi untuk menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap program-program yang berjalan di pemerintahan desa setempat. Aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang sudah digali dan ditampung oleh BPD harus disalurkan ke pemerintahan desa sehingga dapat berjalan dengan baik serta efisien.[3]

---

[2] *Ibid*., hlm. 8.
[3] Anwar K, "*Hubungan Kerja Antara Pemerintah Dengan BPD Menurut UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa*", Universitas Diponegoro, 2015, Jurnal IUS Vol III, Nomor 8.

Tabel 1. Daftar nama-nama Desa di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.[4]

Nomor	**Nama Desa**
1	Jakenan
2	Sembaturagung
3	Dukuhmulyo
4	Tanjungsari
5	Glonggong
6	Jatisari
7	Kalimulyo
8	Karangrejo Lor
9	Karangrowo
10	Kedungmulyo
11	Mantingan Tengah
12	Ngastorejo
13	Plosojenar

[4] Arie Sunardi, "*Wawancara Pribadi*", Kepala Desa Dukuhmulyo, 10 Oktober 2020, Kabupaten Pati.

14	Puluhan Tengah
15	Sendangsoko
16	Sidoarum
17	Sidomulyo
18	Sonorejo
19	Tambahmulyo
20	Tlogorejo
21	Tondokerto
22	Tondomulyo
23	Bungasrejo

Berdasarkan hasil penelitian penulis dipilihnya Desa Dukuhmulyo dan Desa Sembaturagung, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati karena masih terdapat aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat terhadap Pemerintan Desa belum terealisasi dengan baik. Aspirasi masyarakat terhadap pembangunan belum terhubung ke Pemerintah Desa Desa Dukuhmulyo dan Desa Sembaturagung, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati melalui BPD. Kondisi saat ini di Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, pembangunan desa masih

berfokus pada dan pembangunan fisik yaitu jalan, sedangkan saat ini sudah memasuki era globalisasi sehingga kemampuan masyarakat akan teknologi harus diperhatikan diantaranya pelatihan UMKM (usaha kecil menengah mikro) dan pemasarannya untuk kemajuan ekonomi waga Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, mengingat sampai saat ini tidak adanya pelatihan-pelatihan UMKM (usaha kecil menengah mikro).[5]

Data APBDES Desa Dukuhmulyo pada Tahun 2019 untuk pembangunan fisik berupa jalan beton dan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan SDM sebagai berikut:[6]

Nomor	**Tahun**	**Bidang Pembangunan Jalan Dan Pemberdayaan Masyarakat**	**Anggaran Belanja Desa**
1	2019	-Jalan Beton -Normalisasi saluran	Rp. 750.652.000
		Bantuan KPMD -Pelatihan Peningkatan SDM	Rp. 10.500.000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwasannya pada pos bidang pemberdayaan masyarakat sebesar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah dan pos pemberdayaan masyarakat sebesar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah.

[5] Arie Sunardi, "*Wawancara Pribadi*", Kepala Desa Dukuhmulyo, 10 Oktober 2020, Kabupaten Pati.
[6] Arie Sunardi, "*Wawancara Pribadi*", Kepala Desa Dukuhmulyo, 10 Oktober 2020, Kabupaten Pati.

Kondisi di Desa Sembaturagung berbeda dengan Desa Dukuhmulyo, infrastruktur yang ada di Desa Sembaturagung berupa jalan belum sampai pada masyarakat yang rumahnya berada pada jalur paling luar desa, sehingga demi mewujudkan sila ke-lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka harus diberikan akses jalan yang layak terhadap masyarakat yang pemukimannya berada di luar desa Sembaturagung. Mengenai kemajuan ekonomi wujud dari Desa Sembaturagung telah melaksanakan program UMKM, namun memang belum dilengkapi dengan pelatihan pemasaran secara digital sehingga produk tersebut hanya mampu dipasarkan di area Kabupaten Pati saja.[7]

Berdasarkan hal tersebut BPD dengan segala wewenangnya untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat serta dapat mempertimbangkan segala program kerja yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, serta memberi masukan ataupun saran sehingga nantinya program kerja baik secara fisik maupun non fisik dapat berjalan sesuai tujuan dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan uyaitu desa Jakenan yang berada di pusat kecamatan Jakenan dengan indeks pembangunan yang tinggi dan pemberdayaan serta pelatihan SDM. Berikut APBDES Desa Jakenan pada Tahun 2019 sebagai berikut:[8]

---

[7] Dwi Tantri Wurjayanti, "*Wawancara Pribadi*", Kepala Desa Sembaturagung, 12 Oktober 2020, Kabupaten Pati.
[8]Karmin, "*Wawancara Pribadi*", Kepala Desa Jakenan, 15 Desember, Kabupaten Pati.

Nomor	Tahun	Bidang Pembangunan Jalan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggaran Belanja Desa
1	2019	-Jalan Beton -Normalisasi saluran	Rp. 800.352.000
		Bantuan KPMD -Pelatihan Peningkatan SDM	Rp. 35.000.000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwasannya pada pos bidang pemberdayaan masyarakat sebesar delapan ratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan pos pemberdayaan masyarakat sebesar tiga puluh lima juta rupiah.

Sebagai perbandingan desa yang telah melakukan pemerataan infrastruktur serta pelatihan UMKM yaitu Desa Jakenan dan Desa Tanjungsari. Kedua desa tersebut telah melakukan pemerataan infrastruktur berupa jalan beton ataupun jalan aspal, selain itu Desa Jakenan dan Desa Tanjungsari telah melakukan pelatihan UMKM terhadap masyarakat sekitar sehingga masyarakat merasakan dampak secara langsung dan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.[9]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD

[9] Dwi Tantri Wurjayanti, "*Wawancara Pribadi*", Kepala Desa Sembaturagung, 12 Oktober 2020, Kabupaten Pati.

dalam mewujudkan pembangunan di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati **(**studi kasus di Desa Dukuhmulyo dan Desa Sembaturagung)".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam mewujudkan pembangunan di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati (studi kasus di Desa Dukuhmulyo dan Desa Sembaturagung)?
2. Bagaimana kendala hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam mewujudkan pembangunan di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati (studi kasus di Desa Dukuhmulyo dan Desa Sembaturagung)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan kerja antara Pemerintah Desa Dengan BPD dalam mewujudkan pembangunan di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati (studi kasus di Desa Dukuhmulyo dan Desa Sembaturagung).
2. Untuk mengetahui kendala hubungan kerja antara Pemerintah Desa Dengan BPD dalam mewujudkan pembangunan di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati (studi kasus di Desa Dukuhmulyo dan Desa Sembaturagung).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian berjudul "Hubungan Kerja antara Pemerintah Desa Dengan BPD dalam mewujudkan pembangunan di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati", diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pelaksanaan kerjasama antara pemerintah desa dan BPD.

b. Memperkaya referensi penulisan tentang hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

2. Segi Praktis

a. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis penulis yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama antara pemerintah desa dan BPD.

b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak khususnya tentang pelaksanaan kerjasama antara pemerintah desa dan BPD.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis dan pisau analisis terkait pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan umum desa, pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, pembangunan desa, teori pengawasan.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi metode penelitian yang akan digunakan

yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan mengurai dan membahas tentang kajian hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD serta kendala-kendala dalam mewujudkan pembangunan di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati (studi kasus di Desa Dukuhmulyo dan Desa Sembaturagung).

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang dibahas sebelumnya.

Daftar Putaka

Lampiran